



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS
OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Lombok, pada tanggal 19 November 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS
OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Lombok, pada tanggal 19 November 2009 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 19 November 2009 di Lombok, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Bulgaria, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Δ α α α



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

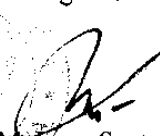
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,


Dr. M. Iman Santoso



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
DAN PASPOR DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria, selanjutnya disebut "Para Pihak".

MENIMBANG hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk lebih memperkuat hubungan tersebut dengan memfasilitasi kunjungan warga negara kedua negara ke masing-masing negara;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL sebagai berikut :

PASAL 1

PEMBEBASAN VISA

1. Warga negara Republik Bulgaria, yang memegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, tidak wajib untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak setiap tanggal masuk.
2. Warga negara Republik Indonesia, yang memegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, tidak wajib untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Bulgaria untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi dari 90 (sembilan puluh) hari dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal pertama masuk.
3. Masa berlaku paspor yang sah dari warga negara Para Pihak harus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 2

PEMBATASAN VISA

Warga negara masing-masing Pihak wajib memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya melalui tempat pemeriksaan perbatasan Pihak tersebut yang terbuka bagi lalu lintas internasional.

PASAL 3

VISA UNTUK ANGGOTA MISI DIPLOMATIK ATAU KONSULER

Warga negara masing-masing Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di dalam wilayah Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya yang menetap bersamanya selama masa penempatan resmi dan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang masih berlaku, wajib dipersyaratkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara Para Pihak, untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar dari Pihak lainnya sebelum kedatangan pertama.

PASAL 4

PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) Pasal ini wajib dikomunikasikan, melalui saluran diplomatik, kepada Pihak lainnya dan harus mulai berlaku dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam setelah penerimaan komunikasi tersebut.

PASAL 5

HAK PENOLAKAN

Salah satu Pihak memiliki hak untuk menolak memberikan izin masuk atau mempersingkat masa tinggal setiap orang yang berhak atas pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini untuk alasan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan publik, atau menimbang bahwa warga negara tersebut dinyatakan sebagai *persona non grata*.

PASAL 6

PERTUKARAN CONTOH

1. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinas yang berlaku.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik atau paspor dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, Para Pihak wajib saling menginformasikan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

PASAL 7

KEHILANGAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

Dalam hal warga negara salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik atau paspor dinas di wilayah negara Pihak lainnya, mereka wajib segera menginformasikan pihak yang berwenang di negara penerima melalui misi diplomatik atau kantor konsuler sesuai kewarganegaraannya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan kepada yang bersangkutan, sesuai dengan perundang-undangan negaranya, suatu dokumen untuk kembali ke negara asalnya.

PASAL 8

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN

Para Pihak wajib memberikan terhadap paspor diplomatik dan paspor dinas pengamanan dengan tingkat tertinggi terhadap pemalsuan.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN BERDASARKAN TRAKTAT ATAU PERJANJIAN LAINNYA

Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak yang timbul dari traktat-traktat dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya dimana mereka, baik bersama-sama maupun secara terpisah, merupakan penandatanganan.

PASAL 10

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul dari pelaksanaan atau ketentuan-ketentuan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai oleh Para Pihak melalui konsultasi atau perundingan.



REPUBLIK INDONESIA

СПОРАЗУМЕНИЕ

между
правителството на Република Индонезия
и
правителството на Република България
за

освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и
служебни паспорти

Правителството на Република Индонезия и правителството на Република България, наричани по-долу за краткост „Страните”,

ИМАЙКИ предвид съществуващите приятелски отношения между двете държави;

ЖЕЛАЕЙКИ допълнително да укрепят тези отношения, чрез улесняване пътуванията на гражданите от двете държави до всяка от тях;

В СЪОТВЕТСТВИЕ с действащите законови и подзаконовни актове на съответните страни:

СЕ СПОРАЗУМЯХА за следното:

ЧЛЕН I

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВИЗА

1. Гражданите на Република България, притежаващи валиден дипломатически или служебен паспорт не се нуждаят от виза, за да влизат, преминават транзит и пребивават на територията на Република Индонезия за срок не по-дълъг от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на всяко едно влизане.

2. Гражданите на Република Индонезия, притежаващи валиден дипломатически или служебен паспорт не се нуждаят от виза, за да влизат, преминават транзит и пребивават на територията на Република България за срок не по-дълъг от 90 /деветдесет/ дни в рамките на всеки 6 /шест/ месеца, считано от датата на първото влизане.

3. Срокът на валидност на паспорта на гражданите на Страните трябва да изтича не по-рано от 6 месеца, считано от датата на влизане на лицето на територията на другата Страна.

2. В случай на въвеждане на нови дипломатически или служебни паспорти, както и на промени в съществуващите, Страните взаимно се информират в писмен вид по дипломатически път за всяка промяна не по-късно от 30 (тридесет) дни преди официалното им въвеждане.

ЧЛЕН 7

ЗАГУБВАНЕ НА ПАСПОРТИ ИЛИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ

В случай, че граждани на държавата на една от Страните загубят или повредят дипломатическите си или служебни паспорти на територията на държавата на другата Страна, те незабавно уведомяват компетентните органи на приемащата държава чрез дипломатическото или консулско представителство на държавата, чийто граждани са. Съответното дипломатическо или консулско представителство издава на гореспоменатите лица, в съответствие със законодателството на своята държава, документ за завръщане в държавата, чиито граждани са.

ЧЛЕН 8

ЗАЩИТА СРЕЩУ ПОДПРАВЯНЕ

Страните осигуряват най-високо ниво на защита срещу подправяне на своите дипломатически и служебни паспорти.

ЧЛЕН 9

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДРУГИ ДОГОВОРИ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Нито в това Споразумение не засяга правата и задълженията на всяка от Страните, произтичащи от други международни договори и споразумения, по които те заседно или поотделно са страни.

ЧЛЕН 10

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички разногласия или спорове, произтичащи от прилагането на разпоредбите на настоящото Споразумение, се решават от Страните в дух на приятелство чрез консултации или преговори.

ЧЛЕН 11

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Това Споразумение може да се изменя по взаимно писмено съгласие между Страните. Изменението влиза в сила в съответствие с разпоредбата на параграф 1 от Член 12 и съставлява неразделна част от това Споразумение.

ЧЛЕН 12

ВЛИЗАНЕ В СИЛА, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

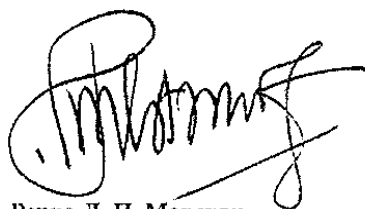
1. Настоящото Споразумение влиза в сила 30 /тридесет/ дни от датата на получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление, с което Страните взаимно се уведомяват, че са изпълнени всички изисквания на националните си законодателства за влизане в сила на Споразумението.

2. Това Споразумение се сключва за срок от 5 /пет/ години и може да се поднови за последващи периоди от пет години по взаимно писмено съгласие на Страните, ако нито една от тях не го прекрати по дипломатически път посредством писмено уведомление до другата Страна 30 /тридесет/ дни преди очакваната дата на прекратяване.

В УВЕРЕНИЕ НА ГОРНОТО долуподписаните, надлежно упълномощени от своите правителства, подписаха това Споразумение.

Изготвено в Ломбок, Индонезия на 19 ноември 2009 г. в два оригинални екземпляра, всеки един от които на индонезийски, български и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването, английският текст ще се ползва с предимство.

ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО
НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ



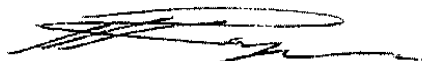
Ретно Л. П. Марсуди

Генерален директор

за Америка и Европа

в Департамента за външни отношения

ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Марин Райков

Заместник-министър

на външните работи



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as "the Parties".

CONSIDERING the existing friendly relations between the two countries;

DESIRING to further strengthen such relations by facilitating the travel of the two countries' nationals to each other country;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

1. Nationals of the Republic of Bulgaria, holding a valid diplomatic or service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period of stay not exceeding 30 (thirty) days, counted from the date of each entry.
2. Nationals of the Republic of Indonesia, holding a valid diplomatic or service passport, shall not be required to obtain a visa to enter, transit and stay in the territory of the Republic of Bulgaria for a period of stay not exceeding 90 (ninety) days within a period of 6 (six) months, counted from the date of first entry.
3. The duration of passport validity of nationals of the Parties shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 2

VISA RESTRICTION

The nationals of the State of each Party shall enter into and leave the territory of the State of the other Party through the border checkpoints of the said Party that are open for international traffic.

ARTICLE 3

VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

Nationals of each Party who are holders of valid diplomatic or service passports and assigned as members of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members who reside with them for the term of their official sojourn and hold valid diplomatic or service passports, shall be required, in accordance with the relevant laws and regulations of the Parties, to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to the first entry.

ARTICLE 4

SUSPENSION

1. Each Party may, at any time, temporarily suspend this Agreement, either in whole or in part, with the reasons of national security, public order or public health.
2. The introduction and termination of the measures stated in paragraph (1) of this Article shall be communicated, through diplomatic channels, to the other Party and shall enter into force within 72 (seventy two) hours after the receipt of such communication.

ARTICLE 5

RIGHTS OF REFUSAL

Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement for reasons of national security, public order or public health, or on account of said nationals being declared a persona non grata.

ARTICLE 6

EXCHANGE OF SPECIMEN

1. The Parties shall exchange through diplomatic channels within 30 (thirty) days after signing of this Agreement the specimens of their valid diplomatic and service passports.
2. In case of introduction of new diplomatic or service passports, as well as modifications of existing ones, the Parties shall inform each other in writing, through diplomatic channels, about any changes not later than 30 (thirty) days prior to their official introduction.

ARTICLE 7

LOSS OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

In case that nationals of the state of one Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the state of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving state through diplomatic mission or consular office of the state of their nationality. The diplomatic mission or consular office concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their state, a document for returning to the state of his/her nationality.

ARTICLE 8

PROTECTION AGAINST COUNTERFEITING

The Parties shall provide their diplomatic and service passports with the highest level of protection against counterfeiting.

ARTICLE 9

RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER OTHER TREATIES OR AGREEMENTS

Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of either Party ensuing from other international treaties and agreements to which they, whether jointly or separately, are signatories.

ARTICLE 10

DISPUTES SETTLEMENT

Any differences or disputes arising out of the implementation or the provisions of this Agreement shall be settled amicably by the Parties through consultation or negotiation.

ARTICLE 11

AMENDMENT

This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall enter into force according to the provision of paragraph (1) of Article 12, and form as an integral part of this Agreement.

ARTICLE 12

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

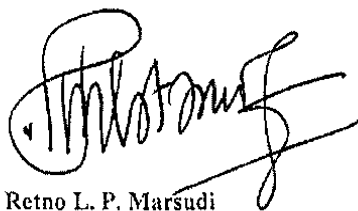
1. This Agreement shall enter into force after 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other through diplomatic channels that all requirements for entry into force of this Agreement, as stipulated by their respective national legislation, have been fulfilled.

2. This Agreement shall remain in force for period of 5 (five) years and may be renewed for further periods of 5 (five) years by mutual consent of the Parties in writing, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the other Party through diplomatic channels 30 (thirty) days prior to the expected termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Lombok, Indonesia, on this 19th day of November in the year 2009, in two originals, each in the Indonesian, Bulgarian and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



Retno L. P. Marsudi
Director General for America and Europe
Department of Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF BULGARIA



Marin Raykov
Deputy Minister of Foreign Affairs

ЧЛЕН 12

ВЛИЗАНЕ В СИЛА, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

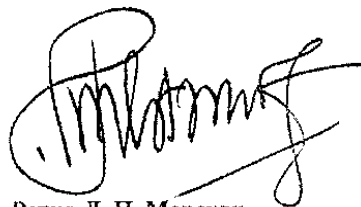
1. Настоящото Споразумение влиза в сила 30 /тридесет/ дни от датата на получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление, с което Страните взаимно се уведомяват, че са изпълнени всички изисквания на националните си законодателства за влизане в сила на Споразумението.

2. Това Споразумение се сключва за срок от 5 /пет/ години и може да се поднови за последващи периоди от пет години по взаимно писмено съгласие на Страните, ако нито една от тях не го прекрати по дипломатически път посредством писмено уведомление до другата Страна 30 /тридесет/ дни преди очакваната дата на прекратяване.

В УВЕРЕНИЕ НА ГОРНОТО долуподписаните, надлежно упълномощени от своите правителства, подписаха това Споразумение.

Изготвено в Ломбок, Индонезия на 19 ноември 2009 г. в два оригинални екземпляра, всеки един от които на индонезийски, български и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването, английският текст ще се ползва с предимство.

ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО
НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ



Ретно Л. П. Марсуди
Генерален директор
за Америка и Европа

в Департамента за външни отношения

ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Марин Райков
Заместник-министър
на външните работи